

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kawasan Asia Tenggara yang tergabung dalam *Association of Southeast Asian Nation* (ASEAN) adalah kelompok regional yang memiliki tujuan untuk mempromosikan perdamaian, stabilitasi, kerjasama politik dan ekonomi, serta integrasi di wilayah ini. ASEAN merupakan kawasan yang kompleks dari berbagai negara, beragam agama, budaya, hukum, standar perdagangan, sistem politik, dan konflik yang berbeda-beda. Pada awal pembentukan ASEAN, regional ini berfokus pada masalah militer dan keamanan regional. Seiring berjalannya waktu karena meningkatnya regionalisme dan persaingan ekonomi, fokus ASEAN berubah dari masalah militer dan keamanan regional menjadi ekonomi. Saat ini ASEAN mendorong kolaborasi antar pemerintah dan kerja sama antar negara anggotanya, serta mengembangkan pertumbuhan ekonomi di kawasan.¹

ASEAN terus menunjukkan kiprahnya dalam membangun kerjasama ekonomi di kawasan Asia Tenggara salah satunya dengan pemanfaatan teknologi. Berbagai kerjasama dalam pemanfaatan teknologi pun dilakukan oleh negara-negara di regional ini untuk terus memajukan perekonomiannya. Demi memajukan perekonomian dengan memanfaatkan perkembangan teknologi di kawasan, ASEAN mempromosikan penggunaan pembayaran digital lintas batas secara

¹ Mohamad Faisol Keling et al., "The Development of ASEAN from Historical Approach," *Asian Social Science* Vol. 07 (2011): 169–189.

meluas untuk semua negara di kawasan.² Salah satu agenda ASEAN *Economic Community* (AEC) untuk mewujudkan integrasi ekonomi pada pembayaran digital lintas batas adalah ASEAN *Digital Integration Framework* 2019-2025.³ Salah satu implementasi atau upaya ASEAN untuk pembayaran digital lintas batas adalah dengan pengadopsian sistem pembayaran berbasis QR *Code* atau yang lebih dikenal dengan QR *Code Cross Border Payment*. Badan penanggung jawab dari terimplementasikannya QR *Code Cross Border Payment* ini adalah *The Working Committee on Payment and Settlement System* (WC-PSS).⁴

Berbeda dengan menggunakan kartu kredit dan debit yang terjaring dalam jaringan Amerika, seperti penggunaan kartu debit dan kredit *MasterCard* setiap transaksi yang dilakukan di luar mata uang dolar Amerika Serikat (USD) akan di konveriskan ke dalam mata uang USD terlebih dahulu.⁵ Pada penggunaan kartu kredit dan debit seperti *MasterCard* akan dikenakan biaya sebesar 1% dari jumlah transaksi.⁶ Namun, dengan QR *Code Cross Border Payment* transaksi akan langsung di konversikan ke mata uang lokal negara tujuan.⁷

² Anupong Avirutha, "ASEAN in Digital Economy: Opportunities and Challenges," *Journal of ASEAN PLUS+* Vol. 2 (2021): 17–24, <https://so06.tci-thaijo.org/index.php/aseanplus/article/view/245334>.

³ ASEAN, *ASEAN Digital Integration Framework*, 2019, https://aseana.org/wp-content/uploads/2018/02/AECC18-ASEAN-DIFAP_Endorsed.pdf.

⁴ ASEAN, *ASEAN Digital Integration Framework Action Plan (DIFAP) 2019-2025*, 2019, <https://www.bing.com/ck/a?!&&p=5f074b9fa73cd6a4JmltdHM9MTcxMDgwNjQwMCZpZ3VpZD0zMTkyNGQ3MC1hOTZILTYyNTctMzI1Ny01Y2I5YTgxMTYzMjQmaW5zaWQ9NTIwMQ&pptn=3&ver=2&hsh=3&fclid=31924d70-a96e-6257-3257-5cb9a8116324&psq=ASEAN+Digital+Integration+Framework+Action+Plan+>.

⁵ Adelstein and D. Randi, *Margin and Capital Requirements for Covered Swap Entities*, 2012.

⁶ Vantage Bank, *CURRENCY CONVERSION AND CROSS-BORDER TRANSACTION FEES* (Texas, n.d.).

⁷ Departemen Komunikasi, "QRIS CROSS-BORDER SOLUSI TRANSAKSI ANTAR NEGARA," *Bank Indonesia*, terakhir diubah 2024, <https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/cerita-bi/Pages/QR-Cross-Border-Solusi-Transaksi-Antar-Negara.aspx>.

Integrasi pengembangan *Local Currency Settlement Framework* (LCS)⁸ dengan *QR Code Cross Border Payment* memiliki peranan untuk meningkatkan efisiensi transaksi, mendukung digitalisasi perdagangan dan investasi, dan menjaga stabilitas makroekonomi. *QR Code Cross Border Payment* memperluas penyelesaian transaksi menggunakan mata uang lokal dengan menggunakan *direct quotation*. Nilai tukar mata uang lokal yang disediakan oleh bank *Appointed Cross Currency Dealers* (ACCD) dibawah kerangka *Local Currency Settlement Framework* akan meningkatkan efisiensi transaksi sehingga biaya transaksi menjadi lebih murah.⁹

Pada KTT ke-42 ASEAN agenda *Local Currency Settlement Framework* berkembang dengan penambahan kerangka kerjasama *Local Currency Transaction Framework* (LCT) dan *Regional Payment Connectivity* (RPC) digitalisasi ekonomi dalam rangka menciptakan integrasi ekonomi, penguatan pertumbuhan ekonomi kawasan yang berkelanjutan, dan memastikan bahwa sektor keuangan yang inklusif dan stabil yang dicanangkan pada *ASEAN Economic Community*. Penggunaan mata uang lokal atau *Local Currency Transaction Framework* (LCT) dalam transaksi lintas batas di Asia Tenggara sangat relevan untuk kita dorong saat ini. Menjaga stabilitas nilai tukar sangat krusial untuk mendukung penguatan ekonomi nasional. Seruan ini kembali bergema dari pertemuan kepala negara anggota ASEAN di KTT ke-42 di Labuan Bajo pada tahun 2023. Deklarasi para pemimpin ASEAN dari KTT

⁸ *Local Currency Settlement Framework* (LCSF) adalah metode penyelesaian transaksi dan pembayaran dengan mata uang lokal di masing-masing negara yang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar USD. Dengan adanya LCS masyarakat mendapatkan kemudahan dalam melakukan transaksi karena tidak perlu lagi mengkonversikan uang mereka ke mata uang dolar USD.

⁹ Abdurahman et al., *Laporan Perekonomian Indonesia 2022*, 2022, https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/LPI_2022.aspx.

ke-42 Labuan Bajo yakni terkait upaya mempercepat konektivitas sistem pembayaran regional dan promosi transaksi menggunakan mata uang lokal atau *Local Currency Transaction Framework (LCT)*.¹⁰

Sama halnya dengan *Local Currency Settlement Framework*, *Local Currency Transaction Framework* juga memiliki tujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap mata uang utama seperti dolar Amerika.¹¹ *QR Code Cross Border Payment* berbasis mata uang lokal diharapkan dapat mewujudkan pembayaran lintas batas yang lebih cepat, lebih murah, lebih aman, lebih transparan, dan lebih inklusif.¹² Penyelesaian transaksi menggunakan *QR Code Cross Border Payment* membawa keuntungan, kemampuannya untuk melindungi negara-negara anggota ASEAN dari fluktuasi nilai tukar dolar Amerika (USD).¹³

ASEAN berinisiatif dalam mempercepat perluasan sistem pembayaran digital melalui *QR Code Cross Border Payment* yang awalnya telah berhasil diimplementasikan secara bilateral dan kini menjadi multilateral, dimana sudah banyak negara mengadopsi *QR Code Cross Border Payment* berbasis penggunaan mata uang lokal. Tercatat pada awal penerapan *QR Code Cross Border Payment* antara Indonesia (QRIS) dan Thailand (Thai QR Payment) pada tahun 2022 hingga bulan Juli 2023, transaksi wisatawan Indonesia di Thailand yang menggunakan kode QR Thailand mencapai 14.555 transaksi dengan nilai Rp 8,54 miliar.

¹⁰ ASEAN, "ASEAN Leaders' Declaration on Advancing Regional Payment Connectivity and Promoting Local Currency Transaction," *ASEAN*, terakhir diubah 2023, <https://asean.org/asean-leaders-declaration-on-advancing-regional-payment-connectivity-and-promoting-local-currency-transaction/>.

¹¹ Abdurahman et al., *Laporan Perekonomian Indonesia 2022*.

¹² ASEAN, "QRIS Menyederhanakan Pembayaran Di Negara-Negara ASEAN," *ASEAN Indonesia 2023*, terakhir diubah 2023, <https://asean2023.id/en/news/qris-simplifies-payments-in-asean-countries>.

¹³ KADIN, *The Increasingly Evident Progress of ASEAN QR Code Financial Integration*, *Arsjad Rasjid: QR Codes of Thailand and Cambodia Have Been Connected*, 2023, <https://kadin.id/wp-content/uploads/20230620-ASEAN-QR-Code-Eng-Copy-.pdf>.

Sedangkan jumlah transaksi wisatawan Thailand di Indonesia dengan QRIS sebanyak 492 transaksi dengan nilai Rp114 juta. Pada tahun 2022 hingga Januari 2024 penggunaan *QR Code Cross Border Payment* antara wisatawan Malaysia di Indonesia ada 73.300 dengan nominal Rp20 miliar, transaksi wisatawan Indonesia di Malaysia ada 11.533 transaksi dengan nominal Rp2,9 miliar.¹⁴

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat kita lihat bahwa *QR Code Cross Border Payment* merupakan alat pembayaran digital yang semakin meluas penggunaannya di kawasan Asia Tenggara. Penggunaan *QR Code Cross Border Payment* berbasis mata uang lokal dapat mewujudkan pembayaran lintas batas yang lebih cepat, lebih murah, lebih aman, lebih transparan, dan lebih inklusif. Adanya *QR Code Cross Border Payment* membawa keuntungan bagi negara-negara di kawasan ASEAN. Populernya pengadopsian sistem pembayaran digital *QR Code Cross Border Payment* berhasil membuat penggunaan mata uang lokal meningkat. Peningkatan mata uang lokal tentu saja membantu mengurangi intensitas penggunaan mata uang asing terutama USD. Penggunaan USD sebagai mata uang perdagangan internasional yang sering dijadikan mata uang perantara dalam bertransaksi akan memudar seiring berkembangnya pembayaran digital dalam kawasan Asia Tenggara. Perlu untuk memahami dampak *QR Code Cross Border Payment* terhadap penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat (USD) di kawasan Asia Tenggara.

¹⁴ ASEAN, "QRIS Menyederhanakan Pembayaran Di Negara-Negara ASEAN."

1.2 Rumusan Masalah

ASEAN telah melakukan perkembangan kerjasamanya yang tidak hanya berfokus pada masalah keamanan dan militer namun juga membahas kerjasama di bidang perekonomian. Salah satu kerjasama ASEAN dalam memajukan per-ekonomiannya adalah mengembangkan sistem pembayaran digital lintas batas atau yang kita kenal dengan *QR Code Cross Border Payment*. *QR Code Cross Border Payment* pertama kali diimplementasikan di Thailand dan Malaysia. Tercatat transaksi wisatawan Indonesia di Thailand melalui kode QR Thailand mencapai 14.555 transaksi dengan nilai Rp 8,54 miliar, sedangkan transaksi wisatawan Thailand di Indonesia sebanyak 492 transaksi dengan nilai Rp114 juta. Untuk transaksi wisatawan Malaysia di Indonesia melalui *QR Code* Indonesia ada 73.300 transaksi dengan nilai Rp20 miliar, sedangkan transaksi wisatawan Indonesia di Malaysia melalui *QR Code* Malaysia ada 11.533 transaksi dengan nilai Rp2,9 miliar. Kebijakan *QR Code Cross Border Payment* akan memberikan dampak terhadap penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat (USD) di kawasan Asia Tenggara.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka pertanyaan penelitiannya adalah “Bagaimana dampak *QR Code Cross Border Payment* terhadap penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara?”

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan dampak *QR Code Cross Border Payment* terhadap penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara.

1.5 Manfaat Penelitian

- a. Secara akademis dapat memberikan sumbangsih dalam perkembangan studi hubungan internasional dalam kajian ekonomi politik global dan dapat menambah wawasan mengenai dampak *QR Code Cross Border Payment* terhadap mata uang dolar Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara.
- b. Secara praktik dapat menambah referensi kepustakaan terkait ekonomi politik global terutama untuk kawasan Asia Tenggara.

1.6 Tinjauan Pustaka

Dalam melakukan penelitian ini, penulis merujuk pada beberapa referensi yang dinilai relevan dan sesuai dengan topik yang akan diteliti. Referensi ini nantinya akan digunakan untuk menganalisis mencari jawaban dari penelitian. Adapun literatur tersebut yaitu:

Literatur yang pertama yaitu *Dollar hegemony: A power analysis*. *Journal of Review of International Political Economy* ini diterbitkan oleh University of Toronto yang di tulis oleh Carla Norrlof ini membahas Dolar telah menjadi mata uang pertama di dunia sejak akhir Perang Dunia II, mungkin sejak periode antar perang, dan merupakan mata uang utama saat ini. Sejak akhir Perang Dunia II, dolar Amerika Serikat telah menjadi mata uang yang paling banyak digunakan

oleh pemerintah, lembaga keuangan, perusahaan, dan individu. Peran internasional dolar memberikan Amerika Serikat serangkaian manfaat, hal ini telah terdokumentasi dengan baik dan mencakup prestise, hak milik, fleksibilitas neraca pembayaran, dan otonomi kebijakan, serta keuntungan modal dan nilai tukar.

Jika peran internasional dolar hilang atau terancam secara serius, pemerintah Amerika, serta perusahaan-perusahaan dan masyarakatnya, harus melepaskan sumber kekayaan, kenyamanan, dan kemandirian yang penting ini. Tanpa dolar, para penganut paham deklinis percaya bahwa pemerintah Amerika akan kesulitan meminjam uang dengan persyaratan yang menguntungkan, yang akan memperburuk kemerosotan ekonomi dan geopolitik Amerika. Penurunan signifikan peran dolar di mata uang internasional bukanlah sebuah kemungkinan belaka, melainkan sebuah kenyataan yang akan segera terjadi. Bermula dengan runtuhnya Bretton Woods, dan semakin meningkat setelah diperkenalkannya Euro dan bangkitnya Tiongkok, terdapat spekulasi yang merajalela bahwa tatanan mata uang multipolar sedang terbentuk. Pada tahun 1970-an hingga 1980-an, masa keemasan dolar dianggap sudah lama berlalu karena serangkaian tantangan yang saling terkait. Defisit transaksi berjalan, guncangan minyak, defisit anggaran, biaya perang, belanja militer dan inflasi dikatakan berskutu melawan posisi dolar di mata internasional.

Ada banyak penjelasan mengenai peran sentral dolar (USD) dalam ekonomi politik internasional. Para ahli sepakat bahwa faktor ekonomi seperti ukuran ekonomi (PDB) serta ukuran pasar komersial dan keuangan menentukan

kapasitas tertentu untuk status mata uang internasional. Likuiditas, kepercayaan, dan jaringan transnasional juga dipandang sebagai faktor pendukung perekonomian. Faktor politik, seperti kredibilitas institusi dalam negeri dan kekuatan politik militer dalam melindungi investasi, juga sangat berperan. Pemerintah Amerika mendorong penggunaan dolar oleh swasta sebagai media menukarkan uang dengan menciptakan opsi menarik untuk mendaur ulangnya. Mendorong negara-negara lain agar dolar dapat diterima, perusahaan dapat membelanjakan dolar secara lokal, sehingga meningkatkan insentif untuk menerima dolar sebagai imbalan atas barang dagangan. Daya tarik dolar sebagai alat tukar umumnya ditentukan oleh likuiditasnya yang merupakan fungsi dari luas dan dalamnya pasar modal Amerika.¹⁵ Jurnal ini digunakan penulis untuk melihat bagaimana perkembangan dolar terutama USD di dunia dan alasan USD menjadi mata uang internasional.

Literatur kedua yaitu *Trends, reasons and prospects of de-dollarization* tahun 2023. Jurnal ini ditulis oleh Yuefen Li pada *research of Global Economic and Development Policies*. Riset ini menyampaikan adanya beberapa negara dan wilayah untuk mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar atau yang disebut sebagai dedolarisasi. Banyak negara-negara berkembang merasa kerugian akibat ketergantungan yang berlebihan pada penggunaan dolar. Negara-negara ini mulai mencari alternatif lain pengganti dolar dalam faktor perdagangan, cadangan devisa, cara penyelesaian keuangan, dan lain-lain. Dedolarisasi juga tampaknya merupakan cerminan dari sentimen dan upaya

¹⁵ Carla Norrlof, "Dollar Hegemony: A Power Analysis," *Review of International Political Economy* 21, no. 5 (September 3, 2014): 1042–1070, <http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09692290.2014.895773>.

untuk menjauh dari dunia unipolar menuju dunia multipolar dalam menghadapi fragmentasi yang semakin mendalam, perubahan narasi, dan aspirasi tatanan ekonomi internasional yang baru yang lebih demokratis. Dominasi dolar yang kuat, pengurangan ketergantungan terhadap dolar tampaknya dilakukan secara bertahap, namun hal ini mempunyai potensi untuk melakukan transformasi penting bagi sistem keuangan internasional dan membawa implikasi signifikan bagi masa depan perdagangan internasional.

Riset ini memaparkan beberapa negara dan wilayah telah melakukan upaya mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar atau dedolarsasi. Contohnya semenjak adanya perjanjian antara Amerika Serikat dan Arab Saudi pada tahun 1945, perdagangan minyak selalu dilakukan dalam mata uang dolar AS. Kini India sudah mulai membeli minyak Rusia dalam Renminbi, mata uang Saudi, dan Rubel. Rusia dan Tiongkok memperdagangkan minyak, batu bara, dan logam Rusia dalam Renminbi. Rusia dan beberapa negara di Afrika memulai membicarakan untuk menetapkan penyelesaian dalam mata uang nasional, menghentikan dolar AS dan Euro. Hal serupa juga terjadi di ASEAN, pada pertemuan resmi seluruh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) pada bulan Maret 2023 di Indonesia, isu yang dibahas adalah bagaimana mengurangi ketergantungan mereka pada dolar AS dan “beralih ke penyelesaian dalam mata uang lokal” sebagai gantinya. India dan Malaysia sudah mulai menyelesaikan perdagangan mereka dengan Rupee India. Penyelesaian dalam mata uang nasional telah dimulai di antara negara-negara BRICS, sementara Filipina dan Thailand juga telah menandatangani perjanjian perdagangan dengan menggunakan mata uang

non-dolar dalam artian sudah menggunakan mata uang masing-masing negara.¹⁶ Jurnal ini berkontribusi pada tulisan penulis untuk melihat beberapa negara sudah melakukan upaya dedolarisasi dengan mengeluarkan berbagai kebijakan dan berkerjasama dan melihat langkah awal dunia internasional untuk mengurangi ketergantungan terhadap USD salah satunya ASEAN.

Literatur ketiga yaitu *Peluang Indonesia sebagai ketua ASEAN Tahun 2023 dalam mempromosikan penggunaan Local Currency Settlement dan QR Lintas Batas terkait Transaksi Perdagangan di Asia Tenggara*. Pada Jurnal Sentris yang ditulis oleh Jason Fernando dan Ezra Yora Turnip menjelaskan mengenai Indonesia merupakan negara di ASEAN yang memiliki peran dalam mempromosikan penggunaan *Local Currency Settlement (LCS) Framework* dan QR Code lintas batas selama memegang keketuaan ASEAN tahun 2023. *Local Currency Settlement Framework* atau penyelesaian dalam mata uang lokal dipilih ASEAN sebagai metode penyelesaian transaksi ataupun pembayaran dengan menggunakan mata uang lokal di setiap negara. Pada awalnya, LCS diinisiasikan oleh tiga negara di ASEAN, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Thailand pada tahun 2018. Kerjasama LCS memiliki tujuan utama mengurangi ketergantungan pada dolar Amerika Serikat yang semakin kuat dan dapat menciptakan situasi yang tidak aman, serta adanya kemungkinan ancaman terhadap keamanan finansial ketiga negara tersebut.

Untuk pengimplementasian penggunaan LCS, membutuhkan instrumen atau teknologi digital untuk memfasilitasi transaksi. Oleh karena itu, ASEAN

¹⁶ Yuefen Li, *Trends, Reasons and Prospects of De-Dollarization, Pada Research of Global Economic and Development Policies.*, 2023.

memilih *Quick Response (QR) Code* dengan metode pembayaran digital dengan *scan* setiap kode pembayaran yang tertera di setiap mitra ekonomi. Penggunaan *QR Code* ini dinilai efisiensi untuk mempermudah dan mempercepat transaksi, mendukung percepatan investasi, menjaga stabilitas makroekonomi dan mikroekonomi, serta membawa keuntungan bagi sektor pariwisata dan UMKM. *QR Code* yang merupakan transaksi berbasis digital, masyarakat dapat melakukan transaksi dengan cepat, mudah, dimana saja, dan kapan saja sehingga sederhananya transaksi ini dapat dilakukan di berbagai negara tanpa harus bergantung pada satu mata uang.¹⁷ Jurnal ini memiliki fungsi sebagai melihat sejarah awal ASEAN mulai meninggalkan dan mengurangi ketergantungan terhadap USD yaitu dengan membentuk kebijakan *QR Code Cross Border Payment* dan pengembangan kerangka kerjasama *Local Currency Settlement*.

Literatur keempat adalah *QRIS Cross Border' as Digital Financial Inclusion Acceleration in Southeast Asia*. Pada *Journal of International Relations* yang ditulis oleh Atsal amar bani rachmad dan Maritza Raharjo. Jurnal ini membahas mengenai penjelasan dari *QRIS Cross Border*. beberapa negara di Asia Tenggara juga sudah melakukannya mulai mengadopsi layanan keuangan digital (*digital finance*). Keuangan Digital Inklusi berdampak positif terhadap UMKM, termasuk transaksi keuangan dan mendokumentasikan transaksi, memperoleh bantuan keuangan dari bank, dan keuangan digital dipandang lebih

¹⁷ Jason Fernando and Ezra Yora Turnip, "Peluang Indonesia Sebagai Ketua ASEAN Tahun 2023 Dalam Mempromosikan Penggunaan *Local Currency Settlement* Dan *QR Code* Lintas Batas Terkait Transaksi Perdagangan Di Asia Tenggara," *Jurnal Sentris* 4, no. 2 (March 18, 2024): 114–134, <https://journal.unpar.ac.id/index.php/Sentris/article/view/7124>.

dapat diandalkan oleh masyarakat karena ketergantungannya pada kecerdasan buatan. Perkembangan QRIS yang dimulai di Indonesia diperkirakan akan mengarah ke digital penyesuaian ekonomi bagi negara-negara Asia Tenggara. Dengan adanya QRIS, maka masyarakat mampu melakukan pengiriman uang lintas batas dan meningkatkannya devisa negara dan neraca perdagangan.

QRIS *Cross-border* diharapkan dapat menjadi langkah awal bagi pengembangan jaringan pembayaran lintas batas di kawasan ASEAN. Beberapa negara di ASEAN telah menjadi mitra negara Indonesia untuk penerapan QRIS *Cross Border* yaitu Bank Indonesia (BI), Bank Negara Malaysia (BNM), Banko Sentral ng Pilipinas (BSP), Monetary Authority of Singapore (MAS), dan Bank of Thailand (BOT). Pada tanggal 25 Agustus 2023 menyusul Bank of Vietnam dalam mengikuti Kerjasama QRIS Cross Border. Semua Kerjasama ini telah tertuang dalam nota kesepahaman *Regional Payment Connectivity (RPC)*. Melalui QRIS *Cross Border* antar negara, kegiatan transaksi yang dilakukan di luar negeri dapat dilakukan secara lebih mudah karena pengguna tidak perlu lagi mengonversikan mata uang pada saat berbelanja di negara yang dituju. Harapannya, dengan adanya QRIS *Cross Border* antarnegara maka akan semakin membuka peluang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta lebih menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi yang berkembang saat ini.¹⁸ Jurnal ini digunakan untuk melihat QRIS merupakan langkah awal QR Code Cross Border Payment di ASEAN terbentuk.

¹⁸ Atsal Amar Bani Rachmad and Maritza Ramadhani Raharjo, “‘QRIS Cross Border’ as Digital Financial Inclusion Acceleration in Southeast,” *Journal of International Relations* 3 (2023), <http://issn.lipi.go.id/>.

Literatur kelima yaitu *Emerging Economics, Emergent Currencies: A look into Dedollarization in Southeast Asia*. Pada *journal of modern economy* yang ditulis oleh Rohan Kumar Agarwal dan diterbitkan oleh *Scientific Research Publishing* membahas mengenai potensi dedolarisasi di Asia Tenggara dengan melihat mata uang dalam beberapa dekade terakhir. Bangkitnya perekonomian paska perang dunia kedua banyak negara harus beradaptasi dengan tatanan perekonomian global yang didominasi oleh dolar. Amerika Serikat yang mempunyai pasar keuangan terbesar dan paling likuid di dunia memainkan peran penting dalam pasar global, dimana dolar mendominasi perdagangan lintas batas. Ketika ketegangan geopolitik meningkat, negara-negara di kawasan Asia Tenggara mulai melihat potensi dari diversifikasi eksposur mata uang mereka dan meminimalkan kerentanan terhadap guncangan finansial dan sanksi ekonomi. Jurnal ini membahas lanskap dolarisasi negara-negara ASEAN dan mengkaji upaya masing-masing kawasan untuk mengurangi ketergantungan mereka pada dolar AS. Jurnal ini melihat upaya-upaya negara-negara di ASEAN untuk mengurangi ketergantungan pada dolar dengan *Local Currency Transaction*.¹⁹

Tulisan-tulisan ini membahas sistematika *QR Code Cross Border Payment* sebagai sistem pembayaran yang berbasis penggunaan mata uang lokal di Asia Tenggara dapat mengurangi penggunaan dolar. Namun, peneliti belum menemukan tulisan mengenai dampak *QR Code Cross Border Payment* terhadap penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat di kawasan Asia

¹⁹ Rohan Kumar Agarwal, "Emerging Economics, Emergent Currencies: A Look into Dedollarization in Southeast Asia," *journal of modern economy* 14 (2023): 1432–1438, https://www.scirp.org/pdf/me_2023102510314370.pdf.

Tenggara pada tahun 2022 sampai penelitian ini dilakukan. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan peranan penting dalam menambah literatur bacaan dalam ilmu hubungan internasional terutama pada *QR Code Cross Border Payment* dapat mengurangi penggunaan dolar di kawasan Asia Tenggara.

1.7 Kerangka Konseptual

1.7.1 Dedolarisasi

Dedolarisasi adalah upaya yang diambil suatu negara untuk mencoba mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat dalam penggunaannya sebagai mata uang perdagangan internasional, cadangan devisa, dan kebijakan ekonomi. Dedolarisasi juga merupakan tindakan yang mencakup sebagai upaya untuk penggunaan mata uang lokal atau diversifikasi mata uang lainnya. Tujuan utama dedolarisasi adalah untuk mengurangi risiko terkait dengan fluktuasi nilai tukar dolar dan meningkatkan perekonomian negara dan kawasan.

Berdasarkan *International Monetary Fund* dalam *IMF Working Paper* yang dikeluarkan pada tahun 2010, dedolarisasi merupakan respon dari pelaku ekonomi terhadap ketidakpastian politik ekonomi yang pada akhirnya berdampak pada penurunan keinginan suatu negara untuk menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat lagi. Kebijakan dedolarisasi memerlukan kombinasi kebijakan makroekonomi dengan langkah-langkah mikroekonomi

dengan cara meningkatkan dan menarik penduduk untuk menggunakan mata uang lokal.²⁰

Dalam dokumen yang sama kebijakan untuk dedolarisasi dapat dilihat dari berbagai aspek. Adapun aspek-aspek dalam kebijakan dedolarisasi tersebut adalah *Macroeconomic Stabilization* atau stabilisasi makroekonomi, *Market-Based Dedollarization Policy* atau kebijakan dedolarisasi berbasis pasar, dan *Forced Dedollarization* atau dedolarisasi yang di paksa. Pertama, *Macroeconomic Stabilization* atau stabilisasi makroekonomi adalah berfokus pada pengurangan dan stabilisasi inflasi, kebijakan stabilisasi ini mencakup konsolidasi fiskal dan kebijakan moneter yang ketat untuk menurunkan tingkat inflasi yang tinggi. Dengan adanya pengurangan dan stabilisasi inflasi yang berkepanjangan, kebutuhan akan melakukan lindung nilai terhadap inflasi melalui penyimpanan mata uang asing berkurang secara signifikan, dan permintaan terhadap aset mata uang lokal dapat meningkat.

Kedua, *Market-Based Dedollarization Policy* atau kebijakan dedolarisasi berbasis pasar adalah memberikan insentif atau syarat yang setidaknya menguntungkan untuk substitusi mata uang yaitu dengan penggunaan mata uang lokal. Ketiga, *Forced Dedollarization* atau dedolarisasi yang di paksa adalah tindakan yang melarang atau membatasi secara ketat penggunaan mata uang asing. Untuk keperluan penelitian ini khususnya yang terkait dengan QR *Cross Border Payment* maka yang paling relevan adalah *Market-Based*

²⁰ Kokenyne Annamaria, Ley Jeremy, and Veyrune Romain, *Dedollarization*, IMF Working Paper No. 2010/188, n.d., <https://www.imf.org/en/Publications/WP/Issues/2016/12/31/Dedollarization-24139>.

Dedollarization Policy atau kebijakan dedolarisasi berbasis pasar. Dalam kebijakan ini terdapat beberapa kebijakan untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat. Adapun kebijakan tersebut yaitu;

1. *Exchange rate, monetary, and fiscal policies*

a. *Exchange rate flexibility*

Nilai tukar yang dapat bergerak ke arah manapun akan berpengaruh terhadap resiko nilai tukar mata uang asing, sehingga menimbulkan pengurangan terhadap dolarisasi keuangan. Pengaturan nilai tukar yang fleksibel dengan sedikit bias terhadap depresiasi mata uang akan menghambat dolarisasi keuangan. Nilai tukar yang fleksibel dapat menghalangi simpanan dalam mata uang asing yang dapat mendorong dedolarisasi.²¹

b. *Efficient liquidity management*

Pengelolaan likuiditas oleh bank sentral akan membuat mata uang lokal lebih menarik untuk digunakan. Pemberlakuan persyaratan cadangan, fasilitas simpanan dan pinjaman, serta operasi pasar terbuka dapat membantu menstabilkan suku bunga antar bank domestik. Pengembangan pasar valuta asing yang berfungsi dengan baik dan tingkat cadangan devisa yang memadai akan menjamin kemudahan akses terhadap valuta asing, sehingga mengurangi kebutuhan untuk menyimpan valuta asing untuk alasan pencegahan²².

c. *Fiscal consolidation*

²¹ Annamaria, Jeremy, and Romain, *Dedollarization*.

²² Annamaria, Jeremy, and Romain, *Dedollarization*.

Mengendalikan fiskal membantu kebutuhan akan pemerintah meminjam dalam mata uang asing akan mengurangi terhadap dolarisasi. Hal ini juga mengurangi kebutuhan pembiayaan bank sentral atas utang pemerintah dan berkontribusi pada penurunan perbedaan antara suku bunga dalam dan luar negeri.²³

d. Unbiased taxation

Dedolarisasi dapat terwujud dapat dilihat dari pajak yang dikenakan oleh kedua pihak yang terlibat. Sistem pajak tidak memandang pendapatan dari mata uang asing seperti dolar lebih menguntungkan dari menggunakan mata uang lokal yang pada akhirnya tidak menciptakan bias terhadap kepemilikan asset dalam mata uang asing. Pajak yang dikenakan baik dari mata uang asing maupun lokal harus merata dipungut baik melalui transaksi yang dilakukan ataupun bunga yang didapatkan.²⁴

2. *Public debt management and financial market development*

a. Public Debt Management

Pengelolaan utang pemerintah yang bertujuan untuk menerbitkan obligasi dalam mata uang lokal akan mendedolarisasi neraca pemerintah, menstimulasi pasar sekuritas domestik, dan meningkatkan fleksibilitas nilai tukar.²⁵

b. Development of a domestic financial market

²³ Annamaria, Jeremy, and Romain, *Dedollarization*.

²⁴ Annamaria, Jeremy, and Romain, *Dedollarization*.

²⁵ Annamaria, Jeremy, and Romain, *Dedollarization*.

Pasar obligasi yang likuid dan dalam memberikan pilihan terhadap untuk investasi yang fleksibel untuk menggantikan simpanan dolar. Surat berharga dalam mata uang lokal yang diperdagangkan di pasar modal dan pasar uang domestik dapat berpartisipasi terhadap penurunan aset dalam mata uang dolar.²⁶

c. Alternatives to dollar-denominated assets

Dengan tidak adanya kepercayaan terhadap aset dalam mata uang lokal, sistem indeksasi yang kredibel dapat meningkatkan investasi pada aset tersebut. Indeksasi harus didasarkan pada harga mata uang lokal guna untuk menghindari acuan mata uang asing dan kemungkinan fluktuasi paralel antara pendapatan pemerintah dan biaya pembayaran utang.²⁷

d. Instrument to hedge currency risk

Lindung nilai risiko mata uang merupakan strategi keuangan yang dirancang untuk melindungi potensi kerugian yang mungkin terjadi akibat fluktuasi nilai tukar. Risiko mata uang atau biasa yang kita kenal dengan risiko nilai tukar mata uang asing dapat terjadi ketika nilai suatu mata uang berubah yang dapat mempengaruhi nilai asset atau liabilitas dalam mata uang tersebut. Instrumen lindung nilai ini memiliki tujuan untuk mengimbangi potensi kerugian dengan mengunci nilai tukar tertentu. Ketika kontrol nilai tukar membatasi instrumen lindung nilai, penduduk mungkin memiliki insentif untuk membangun kepemilikan mata uang asing sebagai fasilitas lindung nilai alternatif.²⁸

²⁶ Annamaria, Jeremy, and Romain, *Dedollarization*.

²⁷ Annamaria, Jeremy, and Romain, *Dedollarization*.

²⁸ Annamaria, Jeremy, and Romain, *Dedollarization*.

3. *Financial policy and prudential regulation*

a. *Financial liberalization*

Membebaskan bank dari kendali administratif terhadap penetapan suku bunga akan meningkatkan kemungkinan untuk suku bunga riil domestik negara yang dapat mendorong penggunaan mata uang lokal. Sistem keuangan domestik akan menjadi lebih kuat maka akan lebih kompetitif dan mata uang lokal lebih menarik.

b. *Withdrawal of the legal tender status from foreign currency*

Ketika mata uang asing masih menjadi alat pembayaran yang sah di suatu negara maka kemungkinan akan dedolarisasi sulit untuk dicapai. Penggunaan mata uang asing masih dilakukan di suatu negara maka akan menjadi ancaman bagi stabilitas mata uang lokal.

c. *Increased usability of the local currency*

Dedolarisasi tidak mungkin dapat tercapai jika USD masih menjadi alat pembayaran transaksi besar yang sah di dalam negara. Oleh karena itu, negara perlu untuk memperkuat penggunaan mata uang lokalnya sebagai pembayaran sah dalam transaksi. Pengenalan mata uang lokal dapat meningkatkan penggunaan mata uang lokal dapat disesuaikan dalam perdagangan dan transaksi.²⁹

d. *Government operations in local currency*

Pemerintah harus mengambil peran dalam operasi penggunaan mata uang lokal. Penggunaan mata uang lokal dalam operasional pemerintah dapat diatur dalam kebijakan dan peraturan khusus yang dapat

²⁹ Annamaria, Jeremy, and Romain, *Dedollarization*.

menjamin stabilitas keuangan, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap standar internasional. Pemerintah dapat melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penggunaan mata uang lokal seperti menaikkan pajak yang dapat mendukung peningkatan permintaan terhadap mata uang lokal.³⁰

e. Use of foreign aid in local currency

Negara-negara kecil pasca konflik sering kali menerima bantuan dalam mata uang asing. Bantuan luar negeri ketika digunakan dalam mata uang asing terutama dolar di negara penerima bantuan dapat meningkatkan dolarisasi terjadi di negara tersebut. Bantuan luar negeri memiliki peran yang sangat besar dalam perekonomian. Dalam mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan mata uang asing, pengguna bantuan tersebut diharapkan menggunakan mata uang lokal untuk mendorong dedolarisasi.³¹

f. Reserve requirements

Pencadangan dalam mata uang asing perlu dihindari. Untuk itu diperlukannya pencadangan dalam bentuk mata uang lokal yang setidaknya memiliki keuntungan sama menguntungkannya dengan pencadangan dalam mata uang asing. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mewajibkan bank untuk mendominasi persyaratan pencadangan pada mata uang asing menjadi pencadangan mata uang lokal dengan cara menerapkan persyaratan yang lebih tinggi untuk pencadangan dalam mata uang asing. Dengan menerapkan persyaratan cadangan yang

³⁰ Annamaria, Jeremy, and Romain, *Dedollarization*.

³¹ Annamaria, Jeremy, and Romain, *Dedollarization*.

lebih tinggi untuk pencadangan dalam mata uang asing akan mendorong bank untuk menggunakan pencadangan dalam mata uang lokal.³²

g. Payment System

Sistem pembayaran domestik harus memastikan mata uang lokal pembayaran dengan persyaratan yang setidaknya sama mengunggulkannya dengan mata uang asing dalam pembayaran. Bank sentral harus menawarkan layanan pembayaran yang nyaman dan berbiaya rendah untuk pembayaran dalam mata uang domestik dan tidak mendukung pembayaran dalam mata uang asing.³³

h. Prudential regulations

Regulasi atau aturan yang dibuat secara berhati-hati merujuk pada seperangkat aturan dan pedoman yang ditetapkan oleh otoritas pengawas keuangan untuk menjamin keamanan, stabilitas, dan integritas lembaga keuangan. Hal ini dirancang untuk mengurangi risiko yang terkait dengan aktivitas keuangan.³⁴

i. Effective supervision

Pengawasan yang efektif berkontribusi secara signifikan terhadap internalisasi risiko yang diakibatkan oleh dolarisasi. Berbagai upaya dilakukan di negara-negara dimana kredit luar negeri tumbuh pesat untuk memantau risiko diambil oleh lembaga perbankan dan non-bank. Bank telah menetapkan langkah-langkah pengendalian internal yang

³² Annamaria, Jeremy, and Romain, *Dedollarization*.

³³ Annamaria, Jeremy, and Romain, *Dedollarization*.

³⁴ Annamaria, Jeremy, and Romain, *Dedollarization*.

lebih ketat dalam mengatasi risiko mengenai pinjaman mata uang asing dan memberi tahu tentang pinjaman tentang risiko.³⁵

j. Foreign exchange regulations

Para pemegang mata uang asing tidak memiliki prioritas dibandingkan mereka yang memiliki dana dalam mata uang dalam negeri. Dalam perkembangan mata uang asing akan diatur oleh negara. Memperbolehkan penduduk melakukan transaksi modal keluar dari sumber mata uang asing mereka sendiri dan melarang transaksi yang sama untuk kepemilikan mata uang domestik dapat memberikan insentif kepada penduduk untuk mengumpulkan mata uang asing untuk transaksi di masa depan.³⁶

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Pada Penelitian ini, penulis memutuskan untuk menggunakan metode penulisan kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang mengeksplorasi dan memahami makna di sejumlah individu atau kelompok yang berasal dari masalah sosial. Pada penelitian kualitatif, peneliti mengumpulkan data sendiri melalui pemeriksaan dokumen, mengamati perilaku, mengumpulkan informasi, dan menafsirkannya. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif

³⁵ Annamaria, Jeremy, and Romain, *Dedollarization*.

³⁶ Annamaria, Jeremy, and Romain, *Dedollarization*.

deskriptif dimana penulis akan menggambarkan bagaimana suatu peristiwa atau fenomena itu terjadi.³⁷

Penelitian ini akan menggambarkan tentang dampak *QR Code Cross Border Payment* terhadap penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder berupa jurnal ilmiah, surat kabar, dan sumber sekunder lainnya. Selain itu data primer juga digunakan sebagai sumber penelitian yang didapatkan dari berbagai sumber seperti dokumen publik situs resmi, pernyataan pers, lembar kerjasama, surat kabar, pernyataan pers dan lainnya.

1.8.2 Batas Penelitian

Pada penelitian ini, penulis membatasi waktu penelitian dengan rentang tahun 2022-hingga penelitian ini dilakukan, karena pada tahun 2022 *QR Code Cross Border Payment* mulai diimplementasikan secara penuh di beberapa negara di kawasan ASEAN.

1.8.3 Unit dan Tingkat Analisa

Sebuah penelitian sudah semestinya terdapat unit analisis, unit eksplanasi, dan tingkatan Analisa. Unit analisis merupakan objek yang akan dianalisis disebut juga dengan *variable dependen*. Di lain sisi, unit eksplanasi adalah objek yang mempengaruhi unit analisis dan sering kali disebut juga *variabel independen*.³⁸ Kemudian, mengenai level analisis

³⁷ John W. Creswell and J. David Creswell, *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches Fifth Edition, Fifth Edit.* (Los Angeles: SAGE Publications, 2018).

³⁸ Mohtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin Dan Metodologi* (Penerbit PT Pustaka LP3ES, 1994).

merupakan sebuah landasan dan fondasi yang digunakan dalam penelitian. Level analisis dalam hubungan internasional menunjukkan cakupan berpikir tingkatan besaran masalah. Level analisis dibagi menjadi 3 bagian, yaitu individu, negara dan sistem internasional. Dalam penelitian ini, unit analisis yang dipilih adalah *QR Code Cross Border Payment* di kawasan ASEAN. Sedangkan unit eksplanasi adalah penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat. Untuk level analisis penelitian ini adalah sistem internasional.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang secara langsung diberikan atau ditemukan kepada peneliti. Data sekunder adalah sumber yang secara tidak langsung diberikan atau ditemukan kepada peneliti seperti melalui dokumen atau jurnal artikel yang diterbitkan.³⁹

1. Data Primer

Dalam mengumpulkan data primer bisa dilakukan dengan instrumen yang secara langsung dapat kita temukan dengan mudah. Dalam mengumpulkan data primer dilakukan dengan cara observasi, dokumen publik, dan wawancara.

- a. Wawancara: pengumpulan data melalui wawancara dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti langsung bertatap muka, melalui telepon, grup diskusi, dan melalui surat atau e-mail. Data primer yang digunakan dalam penelitian

³⁹ Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)* (Bandung: ALFABETA CV, 2015).

ini adalah hasil wawancara terkait *QR Code Cross Border Payment* dari media Bank Indonesia. Peneliti memanfaatkan hasil wawancara mentah yang belum diolah untuk mendukung penelitian.

- b. Sumber media *online*: teknik pengumpulan data ini mengumpulkan dan mengambil dokumen langsung melalui laman lembaga resmi. Beberapa contoh adalah data digital yang berasal dari akun media sosial dan pernyataan pers. Penelitian ini peneliti mengambil dari *Instagram @asean*, *youtube ASEAN* dan akun media sosial Bank Sentral Negara ASEAN lainnya.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bisa peneliti dapatkan secara tidak langsung atau melalui orang lain atau dokumen.⁴⁰ Dalam mengumpulkan data sekunder, peneliti mendapatkan data dari *studi pustaka* melalui bacaan-bacaan situs resmi lembaga, jurnal, buku, penelitian terdahulu, dan lain-lain.

- a. Artikel jurnal: contoh sumber sekunder yang digunakan adalah jurnal *Dollar hegemony: A power analysis. Journal of Review of International Political Economy* ini diterbitkan oleh University of Toronto yang ditulis oleh Carla Norrlof. Jurnal *QRIS Cross Border' as Digital Financial Inclusion Acceleration in Southeast Asia*. Pada *Journal of International Relations* yang ditulis oleh Atsal Amar Bani Rachmad dan Maritza Raharjo. Serta jurnal artikel lainnya yang dapat digunakan pada penelitian ini.

⁴⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)*.

- b. Situs resmi: Peneliti juga menggunakan situs *Internasional Monetary Fund* dalam mengakses *Working Paper* yang relevan dan mendukung penelitian ini. Peneliti juga menggunakan laman resmi melalui tautan <https://www.bi.go.id>, kementerian keuangan <https://www.kemenkeu.go.id>., ASEAN <https://asean.org/>, dan laman lembaga resmi yang berkaitan dengan penelitian.

1.8.5 Teknik Analisis Data

Dalam menjawab pertanyaan penelitian, peneliti menggunakan lima tahap untuk menganalisis data. Adapun lima tahap tersebut yaitu mengelola data, membaca dan mengumpulkan data, mendeskripsikan dan merumuskan data menjadi sebuah tema, menafsirkan data dan menyajikan data.⁴¹

1. Mengelola data

Langkah pertama pada proses penelitian adalah mengelola data. Tahap ini peneliti mengkategorikan data ke beberapa file. Tahap ini dilakukan untuk menyortir dan mengelompokkan data sesuai dengan jenis yang berbeda seperti wawancara, audio visual, hasil observasi lapangan, dan lainnya.

2. Membaca dan mengumpulkan data

Menyortir data yang ada pada tahap awal sesuai dengan keperluan penelitian. Hal ini bertujuan untuk memudahkan peneliti untuk melakukan analisis sesuai dengan fokus yang akan diteliti. Hal ini dapat

⁴¹ Creswell and Creswell, *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches Fifth Edition, Fifth Edit.*

dilakukan dengan membuat catatan kecil untuk memudahkan peneliti dalam mengeksplorasi data untuk dijadikan sebuah ide.

3. Mendeskripsikan dan merumuskan data menjadi sebuah tema

Pernyortiran data membentuk sebuah ide. Proses memberi kode ini akhirnya dapat mewakili suatu kategori informasi yang lebih kecil dan dapat ditafsir atau elaborasi berdasarkan sudut pandang dan perspektif dalam literatur. Informasi yang lebih kecil sebelumnya dapat dijadikan sebagai kode utama yang kemudian dapat direduksi dan dikombinasi menjadi sebuah tema.

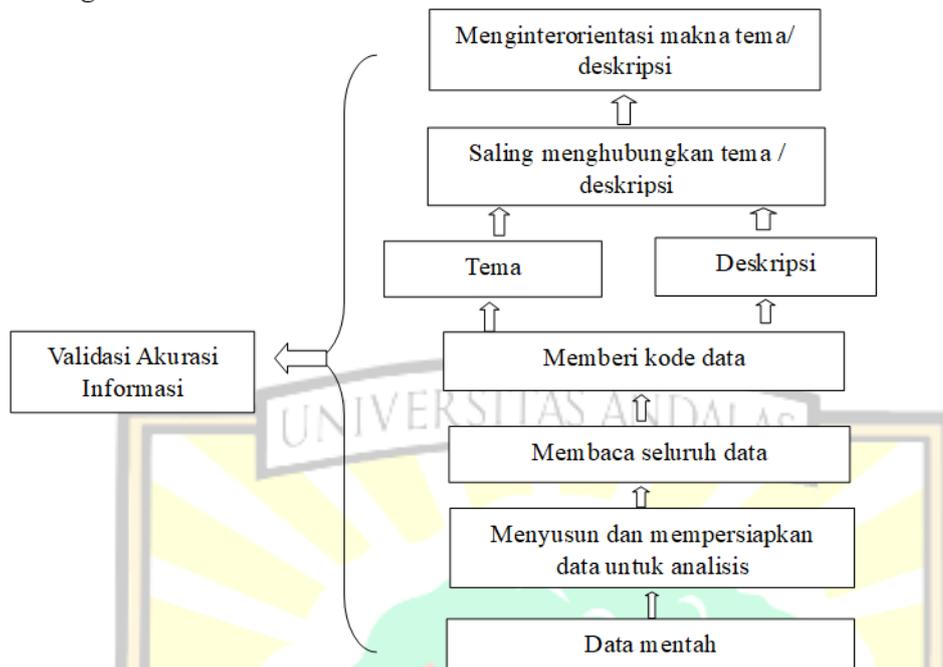
4. Menafsirkan data

Kode yang telah dikumpulkan pada tahap sebelumnya akan menghasilkan topik yang maknanya lebih luas. Pada tahap ini, peneliti bisa memulai proses dari mengembangkan kode ke dalam alur cerita hingga menjadi penjelasan yang lebih luas yang didasarkan pada data.

5. Menyajikan data

Tahap ini merupakan tahap akhir yang akan menjadi hasil yang padu dan rinci. Penjelasan deskripsi dan topik bisa diungkapkan melalui narasi kualitatif. Dalam menyajikan data bisa menggunakan bagian penjelasan. Hasil dari data bisa peneliti jelaskan melalui visual, gambar, table sebagai bahan pendukung dalam hasil penelitian.

Kerangka Analisa Data



Gambar 1. 1 Teknik Analisis Data

Sumber: Creswell (2018)

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka konseptual, metode penelitian yang didalamnya mencakup pendekatan dan jenis penelitian, unit dan tingkat analisis, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB II SEJARAH PENGGUNAAN DOLAR AMERIKA SERIKAT DI INTERNASIONAL DAN ASIA TENGGARA

Bab ini akan membahas mengenai penggunaan dolar di internasional dan antar negara di Asia Tenggara.

BAB III INTEGRASI EKONOMI DI KAWASAN ASIA TENGGARA

Bab ini akan memuat penjelasan terkait integrasi ekonomi id kawasan dan bentuk integrasi ekonomi kawasan yang di keluarkan oleh ASEAN yaitu *QR Code Cross Border Payment* di kawasan Asia Tenggara.

BAB IV ANALISIS DAMPAK QR CODE CROSS BORDER PAYMENT TERHADAP PENGGUNAAN MATA UANG DOLAR AMERIKA SERIKAT

Bab ini berisi tentang analisis dampak *QR Code Cross Border Payment* terhadap penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat di kawasan Asia Tenggara menggunakan konsep dedolarisasi yang dijabarkan oleh *International Monetary Fund (IMF)* tentang kebijakan dedolarisasi negara melalui basis pasar.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini akan memuat kesimpulan dan saran terhadap hasil penelitian